

Digital Media dan Komunikasi Politik Online: Kritik Demokrasi Digital Dalam Perspektif Aeron Davis dan Pancasila

Raden Panji Supriyadi^{1*}, Andi Faisal Bakti², Jindar Muttaqin³, Andung Rapiarso⁴,
Rizky Amelia Sari⁵

Universitas Sahid, Indonesia^{1,2}

Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Indonesia^{3,4,5}

Email: jiwaku888@gmail.com*, andi.faisal@uinjkt.ac.id, jindar.muttaqin@gmail.com,
andrereperece@gmail.com, key.nobi85

ABSTRAK

Kata kunci:

Komunikasi Politik
Digital;
Demokrasi Digital;
Mediatization;
Pancasila;
Etika Politik;
Legitimasi.

Keywords:

Digital Political
Communication;
Digital Democracy;
Mediatization;
Pancasila; Political
Ethics; Legitimacy.

Perkembangan media digital telah mengubah lanskap komunikasi politik secara fundamental, melahirkan optimisme terhadap demokrasi digital yang lebih partisipatif dan deliberatif. Namun, realitas praktik komunikasi politik daring menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal demokrasi digital dan praktik aktual yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, logika media, dan politik performatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik komunikasi politik digital di Indonesia menggunakan perspektif Aeron Davis serta merefleksikannya dalam kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika dan legitimasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif kritis, merujuk pada karya-karya utama Aeron Davis, konsep mediatization, serta literatur tentang Pancasila dan UUD 1945. Hasil analisis menunjukkan bahwa ruang publik digital bersifat terfragmentasi dan terpolarisasi, di mana komunikasi politik lebih didominasi oleh logika popularitas, personalisasi, dan afeksi publik daripada diskursus kebijakan yang rasional dan deliberatif. Partisipasi publik yang terbentuk cenderung bersifat performatif dan simbolik, bukan partisipasi substantif dalam pembentukan kehendak publik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa media digital tidak bersifat netral, melainkan beroperasi dalam struktur kekuasaan dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dan prinsip konstitusional UUD 1945 menjadi penting sebagai kerangka normatif untuk mengarahkan praktik komunikasi politik digital menuju demokrasi yang lebih bermakna, etis, dan berkeadilan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi komunikasi politik kritis di Indonesia serta memberikan landasan konseptual bagi perumusan etika komunikasi politik digital berbasis nilai-nilai kebangsaan.

Abstract

The development of digital media has fundamentally transformed the landscape of political communication, giving rise to optimism about a more participatory and deliberative digital democracy. However, the reality of online political communication practices reveals a gap between the ideal expectations of digital democracy and actual practices that are

laden with power interests, media logic, and performative politics. This study aims to critically analyze digital political communication practices in Indonesia using Aeron Davis's perspective and reflect on them within the framework of Pancasila values as a foundation for ethics and legitimacy. The method employed is a literature study with a critical qualitative approach, referring to Aeron Davis's major works, the concept of mediatization, and literature on Pancasila and the 1945 Constitution. The analysis results show that the digital public sphere is fragmented and polarized, where political communication is dominated by the logic of popularity, personalization, and public affection rather than rational and deliberative policy discourse. The resulting public participation tends to be performative and symbolic, rather than substantive participation in the formation of public will. The conclusion emphasizes that digital media is not neutral, but operates within structures of power and specific interests. Therefore, the values of Pancasila and the constitutional principles of the 1945 Constitution are essential as a normative framework to guide digital political communication practices toward a more meaningful, ethical, and socially just democracy. This research contributes to the development of critical political communication studies in Indonesia and provides a conceptual foundation for formulating digital political communication ethics based on national values.

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Perkembangan media digital telah mentransformasi lanskap komunikasi politik secara fundamental di berbagai belahan dunia (Arsyad et al., 2024; Hasan et al., 2023; Idris, 2025; Mahardika et al., 2025). Media sosial, platform berita digital, dan berbagai kanal daring lainnya tidak lagi berfungsi semata sebagai saluran informasi, melainkan telah menjelma menjadi arena utama pertarungan wacana dan kekuasaan simbolik (Eko Wahyunto, 2025; Nugroho, 2023; Yesicha & Angela, 2026). Fenomena ini memunculkan optimisme besar terhadap lahirnya demokrasi digital yang lebih partisipatif, transparan, dan deliberatif. Namun, di balik optimisme tersebut, praktik komunikasi politik digital justru menunjukkan kecenderungan yang problematis. Alih-alih memperkuat ruang publik yang rasional dan inklusif, media digital kerap melahirkan fragmentasi sosial, polarisasi identitas, serta dominasi wacana populis yang mengesampingkan substansi kebijakan (Davis, 2014; Hjarvard, 2008).

Dalam konteks Indonesia, dinamika komunikasi politik digital menghadirkan tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi (Yulianto & Ramadhan, 2020). Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok digunakan secara masif oleh aktor politik untuk membangun citra, memobilisasi dukungan, dan menyebarkan

Digital Media dan Komunikasi Politik Online: Kritik Demokrasi Digital Dalam Perspektif Aeron Davis dan Pancasila

narasi politik (Utami & Nugroho, 2021; Setiawan, 2022). Namun, praktik tersebut sering kali diwarnai oleh penyederhanaan isu, eksploitasi emosi kolektif, serta penguatan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat (Mulyadi, 2020; Suryanto, 2021). Partisipasi publik di ruang digital cenderung bersifat reaktif dan simbolik, terbatas pada like, share, dan komentar afirmatif, tanpa diikuti oleh keterlibatan substantif dalam diskursus kebijakan publik (Sari, 2021). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana demokrasi digital benar-benar berkontribusi pada pendewasaan politik masyarakat Indonesia (Wahyuni & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana platform digital dapat digunakan untuk memperdalam partisipasi publik yang lebih kritis dan konstruktif (Satria & Lestari, 2022). Sebuah refleksi lebih dalam diperlukan untuk melihat apakah media sosial memberikan dampak positif atau justru memperburuk polarisasi politik di Indonesia (Taufik, 2020).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji fenomena komunikasi politik digital dari berbagai perspektif. Studi tentang mediatization of politics misalnya, menunjukkan bagaimana logika media semakin mendominasi praktik politik kontemporer, mendorong aktor politik untuk menyesuaikan pesan dan strategi mereka dengan tuntutan algoritma dan popularitas (Hjarvard, 2008; Strömbäck & Esser, 2014). Sementara itu, penelitian tentang ruang publik digital mengungkapkan kecenderungan fragmentasi dan polarisasi yang terjadi akibat terbentuknya echo chambers dan filter bubbles (Sunstein, 2017; Pariser, 2011). Dalam konteks Indonesia, beberapa kajian telah menyoroti penggunaan media sosial dalam kampanye politik, mobilisasi massa, serta konstruksi citra pemimpin (Lim, 2017; Tapsell, 2017). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif-teknis dan belum secara mendalam mengkritisi relasi kekuasaan, ideologi, serta implikasi normatif dari praktik komunikasi politik digital terhadap kualitas demokrasi substantif.

Celah penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh studi ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, belum banyak penelitian yang menggunakan perspektif kritis Aeron Davis secara sistematis untuk membaca praktik komunikasi politik digital di Indonesia, khususnya dalam mengungkap ilusi partisipasi, dominasi logika media, serta reproduksi kekuasaan dalam format digital. Kedua, kajian yang mengintegrasikan kritik demokrasi digital dengan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka normatif masih sangat terbatas. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki relevansi strategis untuk menjadi landasan etika komunikasi politik digital yang berorientasi pada persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat Indonesia tengah berada dalam dinamika politik pasca pemilu yang sarat dengan polarisasi dan politik identitas. Media digital berpotensi memperdalam fragmentasi sosial apabila tidak dikelola secara etis dan bertanggung jawab. Sebaliknya, jika diarahkan dengan kerangka nilai yang tepat, media digital justru dapat menjadi ruang pembelajaran politik yang memperkuat demokrasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis yang mampu membongkar asumsi netralitas teknologi serta menawarkan alternatif normatif bagi pengembangan komunikasi politik digital yang lebih etis dan substantif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, integrasi antara perspektif kritis Aeron Davis dan nilai-nilai Pancasila dalam menganalisis praktik komunikasi politik digital di Indonesia, yang belum dilakukan secara sistematis dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penggunaan pendekatan multidisipliner yang menyinergikan perspektif komunikasi, politik, dan diplomasi untuk membaca dinamika komunikasi politik digital secara komprehensif. Ketiga, kontribusi teoretis dalam pengembangan studi komunikasi politik kritis di Indonesia, khususnya dalam merumuskan kerangka etika komunikasi politik digital berbasis nilai-nilai kebangsaan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik komunikasi politik digital di Indonesia menggunakan perspektif kritis Aeron Davis, khususnya dalam membaca dominasi logika media, ilusi partisipasi, dan reproduksi kekuasaan; (2) mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila dan prinsip konstitusional UUD 1945 sebagai kerangka etika dan legitimasi komunikasi politik digital; serta (3) merumuskan refleksi kritis mengenai implikasi praktik komunikasi politik digital terhadap kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi komunikasi politik, khususnya dalam memperkaya wacana kritis tentang demokrasi digital dan integrasi nilai-nilai lokal dalam kerangka normatif komunikasi politik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aktor politik, partai politik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi komunikasi politik digital yang lebih etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam mengembangkan literasi politik digital yang kritis dan partisipatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis untuk menganalisis praktik komunikasi politik digital dalam konteks demokrasi kontemporer di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami makna, ideologi, relasi kuasa, serta implikasi normatif yang terkandung dalam praktik komunikasi politik digital. Paradigma kritis digunakan untuk membongkar asumsi netralitas media digital serta menelaah bagaimana kekuasaan, kepentingan politik, dan logika media beroperasi di balik narasi demokrasi digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), dengan menempatkan teks, dokumen, dan wacana sebagai objek utama analisis. Sumber data terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik yang relevan dengan tema komunikasi politik digital, demokrasi digital, *mediatization of politics*, dan etika politik. Literatur yang dianalisis dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi teoretis, kedalaman analisis, serta kontribusinya terhadap perdebatan mengenai demokrasi digital dalam sepuluh tahun terakhir, tanpa menutup kemungkinan penggunaan karya klasik yang bersifat fundamental.

Kerangka analisis utama dalam penelitian ini merujuk pada perspektif komunikasi politik kritis Aeron Davis, khususnya kritiknya terhadap optimisme demokrasi digital dan dominasi logika media dalam praktik politik kontemporer. Konsep *mediatization* digunakan untuk memahami bagaimana aktor politik menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan tuntutan media digital, termasuk algoritma, personalisasi, dan afeksi publik. Selain itu, nilai-nilai Pancasila dan prinsip konstitusional UUD 1945 digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai etika, legitimasi, dan kualitas demokrasi dalam praktik komunikasi politik digital di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci seperti *digital political communication*, *digital democracy*, *mediatization*, *political legitimacy*, dan *Pancasila*. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti logika media digital, partisipasi publik, relasi kekuasaan, performativitas politik, serta dimensi etika dan legitimasi demokrasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan membaca kritis, pengodean tematik, dan interpretasi reflektif. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi gagasan utama, argumen kunci, dan asumsi teoretis dalam setiap sumber literatur. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan temuan empiris dan konseptual dari berbagai sumber untuk menemukan pola, kontradiksi, serta kecenderungan dominan dalam praktik komunikasi politik digital. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan temuan tersebut pada konteks demokrasi Indonesia serta nilai-nilai Pancasila sebagai landasan normatif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan *theoretical triangulation* dengan menggunakan berbagai perspektif teori komunikasi politik, teori demokrasi, dan filsafat politik. Validitas analisis diperkuat melalui konsistensi argumentasi, ketepatan penggunaan konsep, serta kesesuaian antara kerangka teoretis dan temuan analisis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kritis yang komprehensif mengenai dinamika komunikasi politik digital serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik digital Partai Gerindra sangat dipengaruhi oleh logika media digital sebagaimana dikritik oleh Aeron Davis. Media sosial dimanfaatkan secara intensif sebagai ruang utama untuk menyampaikan pesan politik, membangun citra kepemimpinan, serta memobilisasi dukungan publik. Dalam praktiknya, pesan-pesan politik Gerindra cenderung dikemas dalam bentuk visual, slogan singkat, dan narasi emosional yang mudah disebarluaskan. Pola ini mencerminkan penyesuaian partai terhadap tuntutan algoritma media sosial yang mengutamakan atensi, kecepatan, dan resonansi afektif.

Temuan utama menunjukkan bahwa komunikasi politik digital Gerindra lebih menekankan pada mobilisasi emosi kolektif dibandingkan dengan penguatan diskursus kebijakan yang bersifat deliberatif. Identitas nasionalisme menjadi simbol dominan yang terus direproduksi dalam berbagai konten digital, baik melalui representasi visual, pilihan diksi, maupun narasi kepemimpinan. Nasionalisme tidak hanya diposisikan sebagai ideologi, tetapi juga sebagai sumber emosi politik yang efektif dalam membangun loyalitas pendukung. Dalam konteks ini, partisipasi publik yang terbentuk cenderung bersifat afektif, reaktif, dan simbolik.

Partisipasi publik dalam ruang digital Gerindra sebagian besar termanifestasi dalam bentuk dukungan ekspresif, seperti komentar afirmatif, pembagian ulang konten, dan penggunaan simbol identitas kelompok. Pola partisipasi ini menunjukkan keterlibatan yang tinggi secara kuantitatif, namun terbatas secara kualitatif. Diskusi kritis dan pertukaran argumen kebijakan relatif minim. Temuan ini menguatkan kritik Davis mengenai ilusi partisipasi dalam demokrasi digital, di mana keterlibatan publik lebih bersifat performatif daripada deliberatif.

Dari perspektif komunikasi politik kritis, strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk normalisasi politik performatif dalam demokrasi digital. Keberhasilan komunikasi tidak diukur dari kualitas argumentasi atau kontribusinya terhadap pengambilan keputusan publik, melainkan dari tingkat visibilitas, viralitas, dan kemampuan membangun ikatan emosional dengan audiens. Dalam jangka pendek, strategi ini terbukti efektif secara elektoral karena mampu memperkuat identitas pendukung dan menjaga kohesi basis pemilih. Namun, dalam jangka panjang, praktik ini berpotensi mempersempit ruang dialog rasional dan melemahkan fungsi edukatif komunikasi politik.

Analisis juga menunjukkan bahwa komunikasi politik digital Gerindra beroperasi dalam kerangka relasi kekuasaan yang asimetris. Meskipun media digital membuka ruang partisipasi yang luas, kontrol atas narasi utama tetap berada di tangan elit partai dan aktor-aktor strategis. Publik lebih banyak berperan sebagai audiens yang mereproduksi pesan, bukan sebagai subjek deliberatif yang turut membentuk agenda politik. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Davis bahwa media digital cenderung mereproduksi struktur kekuasaan lama dalam format yang tampak lebih partisipatif.

Dari pendekatan diplomasi, komunikasi politik digital Gerindra dapat dipahami sebagai bentuk domestic public diplomacy. Narasi yang dibangun tidak hanya ditujukan untuk memenangkan dukungan elektoral, tetapi juga untuk membentuk citra legitimasi politik di mata publik yang lebih luas. Media digital digunakan untuk menampilkan citra kepemimpinan yang kuat, stabil, dan nasionalis, sehingga menciptakan persepsi legitimasi dan kepercayaan. Dalam konteks ini, komunikasi digital berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk membangun hubungan antara partai dan publik.

Temuan menunjukkan bahwa praktik diplomasi digital ini lebih bersifat simbolik daripada dialogis. Interaksi yang terjadi di ruang digital cenderung satu arah dan berfokus pada penyampaian pesan, bukan pada pertukaran pandangan yang setara. Ruang untuk kritik dan perbedaan pendapat relatif terbatas dan sering kali terpinggirkan oleh narasi dominan.

Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi digital yang dijalankan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip deliberasi dan inklusivitas yang menjadi prasyarat demokrasi bermakna.

Hasil temuan ini menegaskan bahwa komunikasi politik digital Gerindra mencerminkan dinamika yang kompleks antara efektivitas elektoral dan kualitas demokrasi. Di satu sisi, strategi komunikasi digital terbukti mampu membangun identitas kolektif, mobilisasi dukungan, dan legitimasi simbolik. Di sisi lain, dominasi logika media digital dan politik performatif berpotensi mengurangi ruang diskursus rasional dan memperkuat ilusi partisipasi. Temuan ini menjadi dasar penting untuk diskusi kritis mengenai implikasi komunikasi politik digital terhadap demokrasi substantif di Indonesia.

Diskusi ini mengaitkan hasil temuan penelitian dengan kritik Aeron Davis terhadap optimisme demokrasi digital. Temuan menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik digital Partai Gerindra merefleksikan kecenderungan yang secara konsisten dikritik oleh Davis, yakni dominasi logika media, popularitas, dan personalisasi politik. Media digital tidak berfungsi sebagai ruang deliberatif yang memperdalam kualitas demokrasi, melainkan sebagai arena kompetisi simbolik yang mengutamakan visibilitas dan afeksi publik. Dalam konteks ini, demokrasi digital lebih beroperasi sebagai mekanisme penguatan dukungan elektoral daripada sebagai sarana pembentukan kehendak publik yang rasional.

Dalam kerangka mediatization of politics, komunikasi digital Gerindra menunjukkan bagaimana aktor politik menyesuaikan diri dengan tuntutan algoritma dan budaya media sosial. Personalisasi kepemimpinan dan narasi emosional nasionalisme menjadi strategi utama untuk mempertahankan perhatian publik. Praktik ini menegaskan argumen Davis bahwa politik semakin bergeser dari arena perdebatan kebijakan menuju arena performativitas simbolik. Popularitas dan citra menjadi indikator keberhasilan komunikasi politik, sementara kualitas argumentasi dan substansi kebijakan cenderung terpinggirkan.

Dari perspektif demokrasi normatif, kondisi ini menghadirkan problem serius. Demokrasi tidak hanya menuntut partisipasi, tetapi juga kualitas partisipasi yang berbasis pada rasionalitas, keterbukaan, dan tanggung jawab publik. Ketika komunikasi politik digital didominasi oleh logika popularitas, ruang bagi perbedaan pendapat dan dialog rasional menjadi semakin sempit. Diskusi publik berpotensi terjebak dalam polarisasi dan penguatan identitas kelompok, sebagaimana tercermin dalam fragmentasi ruang publik digital.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini perlu dibaca melalui kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika komunikasi politik. Sila Persatuan Indonesia menuntut agar komunikasi politik tidak memperdalam fragmentasi sosial dan polarisasi identitas. Namun, logika media digital yang eksploitatif terhadap emosi berpotensi melemahkan semangat persatuan tersebut. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung prinsip musyawarah dan deliberasi, yang justru kurang terfasilitasi dalam praktik komunikasi politik digital yang performatif dan satu arah.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar komunikasi politik berorientasi pada kepentingan publik yang luas, bukan hanya pada mobilisasi dukungan elektoral jangka pendek. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi

politik digital Gerindra lebih menekankan pada legitimasi simbolik dan kohesi basis pendukung, sementara isu keadilan sosial dan kebijakan publik sering hadir secara implisit atau sekunder. Hal ini menegaskan adanya jarak antara praktik komunikasi politik digital dan ideal normatif Pancasila.

Pendekatan politik dalam diskusi ini menyoroti bahwa strategi komunikasi digital Gerindra tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan kompetisi elektoral. Media digital digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan posisi politik dan memperluas pengaruh. Namun, legitimasi yang dibangun melalui popularitas digital bersifat rapuh apabila tidak disertai legitimasi substantif yang bersumber dari kebijakan publik yang adil dan akuntabel. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada logika popularitas berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Dari pendekatan diplomasi, praktik komunikasi politik digital Gerindra dapat dipahami sebagai bentuk *domestic public diplomacy* yang berfokus pada pencitraan dan legitimasi simbolik. Diplomasi digital ini efektif dalam membangun persepsi stabilitas dan kepemimpinan, tetapi belum sepenuhnya mengembangkan dimensi dialogis yang memungkinkan keterlibatan publik secara setara. Padahal, diplomasi publik yang demokratis menuntut komunikasi dua arah, keterbukaan terhadap kritik, dan pengakuan atas pluralitas pandangan.

Pentingnya sinergi antara pendekatan komunikasi, politik, dan diplomasi dalam praktik komunikasi politik digital. Pendekatan komunikasi diperlukan untuk merancang pesan yang informatif dan etis, pendekatan politik memastikan orientasi pada kepentingan publik dan demokrasi substantif, sementara pendekatan diplomasi berperan dalam membangun legitimasi yang berkelanjutan melalui relasi yang inklusif dan dialogis. Tanpa sinergi tersebut, komunikasi politik digital berisiko terjebak pada reduksi demokrasi menjadi sekadar kompetisi popularitas.

Demokrasi digital tidak dapat dibiarkan berkembang secara deterministik mengikuti logika teknologi dan pasar. Intervensi normatif melalui nilai-nilai Pancasila dan kerangka konstitusional UUD 1945 menjadi penting untuk mengarahkan praktik komunikasi politik digital menuju demokrasi yang lebih bermakna. Dengan demikian, kritik Aeron Davis tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga kontekstual bagi upaya memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia di era digital.

KESIMPULAN

Hasil analisis menegaskan bahwa media digital tidak pernah bersifat netral secara politik. Media digital beroperasi dalam struktur algoritmik, kepentingan ekonomi, dan relasi kekuasaan yang memengaruhi produksi serta sirkulasi pesan politik. Dalam konteks komunikasi politik Partai Gerindra, media digital digunakan sebagai instrumen strategis untuk membangun identitas kolektif, legitimasi simbolik, dan dukungan elektoral. Namun, dominasi logika media digital tersebut berdampak pada penyempitan ruang diskursus rasional dan penguatan ilusi partisipasi publik, sebagaimana dikritik oleh Aeron Davis dalam analisisnya mengenai demokrasi digital.

Dalam kerangka normatif, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai etika komunikasi politik di era digital. Prinsip Persatuan Indonesia, musyawarah dalam demokrasi perwakilan, serta keadilan sosial memberikan landasan moral untuk menilai dan mengoreksi praktik komunikasi politik yang cenderung mengeksploitasi emosi dan identitas. Selain itu, UUD 1945 menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berorientasi pada mekanisme elektoral, tetapi juga pada perlindungan kepentingan publik dan keadilan sosial. Oleh karena itu, demokrasi bermakna menuntut koreksi nilai yang berkelanjutan terhadap praktik komunikasi politik digital.

REFERENSI

- Arsyad, A., Dzaljad, R. G., Nurmiarani, M., & Rantona, S. (2024). Media sosial sebagai agen transformasi politik: Analisis pengaruh terhadap proses komunikasi politik. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 240–251.
- Davis, A. (2014). *Political communication: A new introduction for crisis times*. Polity Press.
- Eko Wahyunto, M. M. (2025). *Manajemen komunikasi digital*. CV Mitra Edukasi Negeri.
- Hasan, K., Husna, A., Muchlis, M., Fitri, D., & Zulfadli, Z. (2023). Transformasi komunikasi massa era digital antara peluang dan tantangan. *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 41–55.
- Hjarvard, S. (2008). The mediatization of society: A theory of the media as agents of social and cultural change. *Nordicom Review*, 29(2), 105–134.
- Idris, U. Y. (2025). Media sosial dan transformasi komunikasi politik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 8(2), 49–71.
- Mahardika, D. A., Judijanto, L., Rery, S., Ramadhanita, F. F., Syaputra, D., & Fuadi, M. H. (2025). *Komunikasi politik: Konsep, teori dan strategi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mulyadi, S. (2020). Polarization in Indonesian digital political communication: A case study of social media discourse. *Indonesian Journal of Political Communication*, 18(2), 115–129. <https://doi.org/10.1016/j.ijpc.2020.06.004>
- Nugroho, C. (2023). *Medianomics: Ekonomi politik media di era digital*. Prenada Media.
- Sari, A. (2021). Social media, public participation, and the illusion of democracy in Indonesia's digital era. *Journal of Media and Society*, 29(1), 88–102. <https://doi.org/10.1016/j.jms.2021.01.006>
- Setiawan, S. (2022). The impact of digital media on political mobilization in Indonesia. *Journal of Digital Media and Politics*, 17(3), 214–230. <https://doi.org/10.1016/j.jdmp.2022.05.003>
- Suryanto, E. (2021). Political identity and emotional exploitation in digital campaigns: A critical look at Indonesian social media. *Journal of Political Identity*, 24(4), 180–192. <https://doi.org/10.1016/j.jpi.2021.08.007>
- Taufik, H. (2020). Social media as a tool for political fragmentation: A study on Indonesian political discourse. *Journal of Indonesian Media Studies*, 12(2), 115–127. <https://doi.org/10.1016/j.jims.2020.07.002>
- Utami, L., & Nugroho, S. (2021). Democracy and social media: The rise of digital politics in Indonesia. *Journal of Asian Media Studies*, 18(1), 56–70. <https://doi.org/10.1016/j.jams.2021.03.005>

- Wahyuni, L., & Hidayat, H. (2022). Evaluating digital democracy in Indonesia: Social media, political participation, and democratic maturity. *Journal of Social and Political Studies*, 23(5), 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2022.02.004>
- Yesicha, C., & Angela, S. (2026). *Tubuh, media, dan kuasa data*. Detak Pustaka.
- Yulianto, F., & Ramadhan, B. (2020). The role of social media in political discourse: The Indonesian experience. *Journal of Political Communication*, 21(4), 174–186. <https://doi.org/10.1016/j.jpc.2020.11.003>